

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA ANTARA PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI
SUNGGUMINASA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURHIDAYAH

NIM: 10500113279

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA ANTARA PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI
SUNGGUMINASA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURHIDAYAH

NIM: 10500113279

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHIDAYAH
NIM : 10500113279
Tempat/Tgl. Lahir : Ritaya, 17 Juli 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : Ritaya Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa
Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juli 2017

Penulis

Nurhidayah

NIM: 10500113279

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulisan skripsi saudara Nurhidayah, NIM: 10500113279, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Makassar, 24 Juli 2017

Penguji I



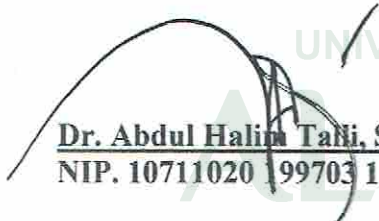
Rahman Syamsuddin, S.H., M.H
NIP. 19821122 200912 1 014

Penguji II



Azhar Sinelele, S.H., M.H
NIP. 19690717 201411 1 001

Pembimbing I



Dr. Abdul Halim Tali, S.Ag., M.Ag.
NIP. 10711020 199703 1 002

Pembimbing II



Drs. H. Munir Salim, M.H
NIP. 19531231 197803 1 006

MAKASSAR

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa”**, yang disusun oleh saudari **Nurhidayah**, NIM: **10500113279**, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 14 Agustus 2017
21 Zulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Munir Salim, M.H	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 1993003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Nurhidayah, NIM: 10500113279, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 7 Juli 2017

Pembimbing I


Dr. Abdul Halim Talli S.Ag., M.Ag.
NIP. 10711020 199703 1 002

Pembimbing II


Drs. H. Munir Salim, M.H
NIP. 19531231 197803 1 006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”**. Sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penyusun jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat ke jalan Dineul Islam. Beliau adalah hamba Allah swt yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kegelapan gulita.

Skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku Haeruddin dan St. Hasniah terkhusus kepada ibunda tercinta atas segala perhatian dan do'a yang diberikan kepada penyusun serta perjuangannya dalam membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya seorang diri, karena kerja keras beliau penyusun bisa sampai pada tahap ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. atas segala perhatian yang diberikan kepada penyusun selama menjadi mahasiswa pada almamater Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag dan para Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
4. Bapak Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Munir Salim, M.H, selaku dosen pembimbing II skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah swt.
5. Ibu Istiqamah, SH.,MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Sekretaris jurusan ilmu hukum serta staf jurusan ilmu hukum, yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Amin.
7. Para staf administrasi di lingkungan akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak membantu

penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

8. Instansi terkait Pengadilan Negeri Sungguminasa dan para Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yakni Bapak Amiruddin Mahmud, SH.,MH, dan Bapak Sigit Triatmojo, SH. Selaku Hakim Mediator dan Bapak Abdul Latif, SH. yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.
9. Semua sahabatku pada jurusan ilmu hukum yang saya sayangi dan saya cintai yang telah membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini, yang namanya tidak sempat saya sebutkan satu demi satu.
10. Teman-teman seperjuanganku Nurjannah, Eka Agusriani Syamsur, Rezky Ameliah, Amiruddin, Ahmad Alka, Muh. Ardiansyah Siregar, dan Erma Windasari L atas dorongan semangat yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko 5 Angkatan 53 desa Tompobulu Alwi Dahlan, Syamsul Mawardi, Nurannisa Anas, Novi Yani, Fatimah, Nurfityatil Khair yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabatku Sukmawati Achmad dan Nurul Hijrah, Kakak-kakak serta adik-adik di Gerakan Pramuka Ambalan Pa Patta yang selalu memberikan motivasi

dan dorongan semangat serta hiburan yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya teriring do'a kepada Allah swt, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Gowa, 20 Juni 2017

Penulis,

NURHIDAYAH

NIM. 10500113279

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
BAB II PEMBAHASAN.....	15-78
A. Pengertian Mediasi.....	15
B. Mediasi Dalam Kerangka Konflik	17
C. Dasar Hukum Mediasi.....	24
D. Prinsip-Prinsip Mediasi	29
E. Peran dan Fungsi Mediator.....	35
F. Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri.....	71
G. Manfaat Mediasi	75
BAB III METODE PENELITIAN	79-83
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian	79

C. Metode pengumpulan data	80
D. Instrumen Penelitian	81
E. Sumber Data	81
F. Analisis Data.....	82
G. Pengujian Keabsahan Data.....	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84-111
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	84
B. Pelaksanaan Mediasi terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	89
C. Faktor-faktor Penghambat Proses Mediasi di Pengadilan.....	95
D. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa	103
BAB V PENUTUP.....	112-113
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
RIWAYAT HIDUP.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	118

ABSTRAK

Nama : Nurhidayah

NIM : 10500113279

Judul : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Skripsi dijelaskan tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dibuat dengan tujuan dan harapan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi dan juga mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah.

Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan demi terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak.

ABSTRAK

Nama : Nurhidayah

NIM : 10500113279

Judul : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Skripsi dijelaskan tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dibuat dengan tujuan dan harapan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi dan juga mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah.

Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan demi terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik.¹

Secara fisik manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, namun dengan intelektualitasnya manusia mampu untuk bertahan hidup dan mengendalikan fungsi-fungsi dalam lingkungan secara luas menjadi bagian dari sarana untuk memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya. Dimensi berfikir manusia berkembang jauh lebih pesat dibanding kemampuan lingkungan untuk mendukungnya, sehingga keseimbangan dalam interaksi sosial lambat laun mulai menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan karena komunikasi antar individu dalam sub sistem lingkungan telah terkontaminasi oleh reaksi negatif dari perubahan sosial yang tidak terkontrol.

¹Nurnaningsih Amriani, *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan* (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1.

Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat hingga telah memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih-benih konflik dalam sistem sosial yang pada tahapan selanjutnya akan mendorong lahirnya paham-paham tertentu, seperti paham *egoisme*, *materealisme*, dan *individualisme* dalam struktur masyarakat secara global. Kondisi sosial seperti ini akan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dan ketegangan sebagai akibat dari terganggunya keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar individu.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang *kontra produktif* semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum *litigasi*.²

²D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 1-2.

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari bahkan tingkat probabilitasnya tidak sanggup dieliminasi sampai kepada titik nol. Hukum dan para pendukungnya sebagai bagian dari pranata sosial yang memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban pada kenyataannya tidak mampu untuk menekan perluasan gejala sosial yang menunjukkan potensi konflik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.³

Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (*Het Herziene*

³Syahril Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 301.

Indonesische Reglement) atau pasal 154 Rbg (*Rechtreglement Buiten Gewesten*).⁴ Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi.⁵ Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela berdamai dan selanjutnya mencabut perkaranya. Dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat proaktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian hukum acara yang tidak bisa terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya.⁶

Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan

⁴Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 159.

⁵Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab I, pasal II.

⁶Rasma Samma, "Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa". *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), h. 4.

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di pengadilan tidak efektif.

Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA No.1 Tahun 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya itikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.⁷

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan penelitian dan mengkaji kembali kelemahan-kelemahan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta

⁷Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011), h. 183.

memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Akan tetapi kenyataannya praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.⁸

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para

⁸ digilib.uinsby.ac.id di akses pada hari kamis tanggal 7 desember 2016

pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁹

Dalam praktik, penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama dan berlarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan,¹⁰ proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga akses untuk memperoleh keadilan tidak cepat.¹¹

Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri, selain sebagai instrument efektif mengatasi beban perkara karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²

⁹Rasma Samma, “Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa”. *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), h. 5.

¹⁰Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), h. 30.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 1998), h. 2.

¹²Widya Astuti, “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”. *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 4.

Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.¹³

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata terhadap para pihak dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2. Deskripsi Fokus

Kata efektivitas mediasi terhadap penyelesaian sengketa ini memiliki makna sebuah tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya perdamaian yang dilakukan oleh mediator pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menyelesaikan suatu sengketa terhadap kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa guna mengakhiri persoalan.

¹³Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional*, kencana prenatal media group, (Jakarta: 2009), h. 283.

Mediasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa Alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Perantara yang demikian kadangkala memang diperlukan, baik dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri karena berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka, atau karena kedua belah pihak “*intentionally*” memang tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu, jika memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil akhir pranata penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk mediasi ini tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.¹⁴

Penyelesaian yang dimaksud adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengarahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat demi tercapainya kata sepakat yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sengketa yang dimaksud adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban perintah dan larangan. Sengketa atau beda

¹⁴Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2.

pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Kata “Perdata” adalah segala sengketa yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di kemukakan pokok masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa ?
3. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa

- c. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa

2. Kegunaan Hasil Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum perdata, khususnya mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, buku yang berjudul “HUKUM ACARA MEDIASI di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” oleh D.Y. Witanto. Buku ini membahas tentang norma-norma yang terkandung di dalam PERMA dengan kenyataan yang ada dalam praktek dengan menggunakan ilustrasi dan contoh-contoh kasus dalam beberapa

pembahasan agar dapat terbangun logika dalam mencerna dan memahami segala persoalan dalam proses perdamaian di pengadilan yang secara karakteristik agak sedikit berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kedua, buku yang berjudul “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan” oleh Nurnaningsih Amriani. Buku ini memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, negosiasi, konsiliasi dengan meletakkan tekanan utama pada pembahasan mediasi. Kemudian membahas mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan Perundang-undangan yang ada. Disertai pembahasan mengenai potensi pengembangan serta analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketiga, buku yang berjudul “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat” oleh Takdir Rahmadi. Buku ini menelaah mediasi dari aspek konseptual dan struktural, serta keterampilan mediator (*mediator skill*). Faktor-faktor konseptual dan struktural antara lain, pengertian, persamaan dan perbedaannya dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, kekuatan dan kelemahan, variasi penerapannya, serta faktor-faktor budaya dan kekuatan yang mendorong mediasi dapat berlangsung. Sedangkan pada penelitian ini, masalah yang akan dibahas mengenai mediasi dalam kaitannya dengan penerapannya, dan berbagai

landasan yuridisnya, dan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa para pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Keempat, skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015” yang diselesaikan pada Tahun 2016 oleh RISTAMI MILANA. Dalam skripsinya dibahas mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, kekuatan hukum putusan perkara perdata, dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹

Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.

²Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2.

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.³

Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.⁴

Definisi mediasi secara terminologi banyak para ahli yang mengemukakannya, diantaranya yaitu:

- a. **Jimly Joses Sembiring**, mengemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁵
- b. **Garry Goopaster**, memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁶
- c. Menurut **Joni Emerzon**, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan

³D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 17.

⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), h. 414.

⁵Jimly Josep Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di pengadilan (Negosiasi,konsiliasi & Arbitrase)* (Cet.1; Jakarta: Visimedia, 2011, h. 27.

⁶Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta : ELIPS Project, 1993), h. 201.

tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁷

B. Mediasi Dalam Kerangka Konflik

Penyelesaian perkara di pengadilan sering diibaratkan dengan istilah “*kalah jadi abu menang jadi arang*” artinya yang menang dan yang kalah akan sama-sama menderita kerugian. Kondisi tersebut merupakan asumsi yang sulit untuk dibantah karena pada umumnya orang berpendapat demikian terhadap dinamika proses *litigasi* yang terjadi saat ini, apalagi mereka yang pernah mengalami langsung berperkara di pengadilan pasti akan merasakan betapa proses persidangan itu begitu banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran, yang kesemuanya sulit untuk dinilai secara materi. Selain itu hampir pada setiap tahapan sidang selalu memerlukan biaya yang jumlahnya cukup besar, apalagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat karena harus mengeluarkan biaya awal (panjar) untuk membiayai proses penyelenggaraan sidang.

Orang yang mengajukan gugatan layaknya sedang bermain judi, karena terlebih dahulu harus mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk panjar sebagai modal awal atau bisa dibilang pancingan bagi sebuah harapan yang jauh lebih besar.

⁷Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 69.

Orang mengajukan gugatan tidak selalu berujung dengan kemenangan. Jika gugatannya mampu dibuktikan di Hadapan Hakim mungkin saja gugatannya akan dimenangkan. Namun sebaliknya jika gugatannya tidak dapat dibuktikan atau dianggap tidak beralasan, maka gugatan itu akan ditolak dan penggugat harus menerima kerugian sejumlah biaya panjar yang telah terpakai sebagai ongkos berjalannya perkara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 181 Ayat (1) HIR/ 192 Ayat (1) RBg yang berbunyi:

“barang siapa yang dinyatakan kalah, maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari proses persidangan yang dilakukan”.

Kesadaran tentang sulitnya memberikan kepuasan kepada semua pihak dengan menggunakan standar menang atau kalah (*win or lose*) sebenarnya telah lama diambil oleh para pengambil kebijakan di lembaga Legislatif (DPR) dan Yudikatif (Mahkamah Agung) walaupun kebijakan yang dikeluarkan terhadap persoalan tersebut belum tentu signifikan. Dalam proses penyelesaian secara *litigasi*, sengketa yang berbasis sentiment dan dendam pribadi sering tidak sanggup diselesaikan dengan pendekatan hukum, bahkan dengan hasil akhir yang bersifat menang dan kalah pada kenyataannya justru semakin menimbulkan rasa dendam bagi pihak yang dinyatakan kalah. Sehingga memicu untuk terus melakukan upaya/tindakan pembalasan atas kekalahannya, baik dengan cara-cara legal dengan mengajukan upaya hukum maupun secara non legal. Persoalan dendam dan harga diri pasca penjatuhan putusan, bahkan bisa lebih rumit dibandingkan dengan persoalan

pokoknya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan tercipta konflik yang baru yang sifatnya lebih kompleks.

Pada umumnya orang mengajukan gugatan ke pengadilan karena dipicu oleh gesekan emosional, atau setidaknya sengketa yang telah dibumbui oleh persoalan-persoalan non hukum. Tidak heran jika banyak yang secara terang-terangan mengakui, bahwa dia telah memperhitungkan nilai materinya, yang penting bisa menumpahkan hasrat ingin puas kepada lawan perkaranya jika dinyatakan kalah atau dihukum oleh putusan pengadilan.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemenangan dalam berperkara adalah hal yang sangat penting. Dengan kemenangan yang diperoleh akan menunjukkan harga diri dan kehormatan pribadinya, walaupun menurut perhitungan ekonomis jelas perbuatan seperti itu sama sekali tidak mendatangkan keuntungan karena nilai gugatan yang diperebutkan sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan.⁸

Dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di peradilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup *progresif* antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada

⁸D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 22-23.

perkara-perkara perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.⁹

Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhir tidak akan menggunakan prinsip *win or lose*. Kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang *mengikat* dan *final*. Mengikat karena setiap butir-butir yang disepakati dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi (*executable*) jika salah satu pihak di kemudian hari mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan para pihak menjadi akta perdamaian, maka tertutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak.

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.

⁹Darmoko Yuti Witanto, "Beberapa Permasalahan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan", *Varia Peradilan*, no. 294 (Mei 2010), h. 70.

Harus diakui bahwa upaya memberdayakan lembaga perdamaian pada perkara-perkara perdata sangatlah penting mengingat tingginya intensitas penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam sengketa perdata para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai peninjauan kembali, bahkan banyak perkara yang objek sengketanya sangat kecil sekalipun tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan waktu yang cukup panjang hanya untuk menyelesaikan satu perkara perdata.

Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*) dalam waktu dekat.

Dalam proses mediasi para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki *independensi* terhadap materi perkara dan keterikatan dengan para pihak yang bersengketa. Para pihak selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui kaukus atau pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak, yang mana hal itu sulit dilakukan oleh Hakim yang menyidangkan perkaranya karena akan berbenturan dengan aturan kode etik yang melarang Hakim memeriksa perkara untuk berkomunikasi dengan salah satu pihak yang berperkara. Disinilah

salah satu letak kelebihan proses perdamaian dengan bantuan seorang mediator dibandingkan dengan perdamaian yang difasilitasi oleh Hakim yang menyidangkan perkaranya.

Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena adanya benturan kepentingan. Adanya kalanya individu yang terlebit konflik tidak mampu untuk melakukan *negosiasi* atau menemukan suatu *resolusi* yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti ini akan semakin buruk jika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan akan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing pihak mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu akhirnya kesepakatan sulit dicapai. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa akan menjadi sangat penting ketika ketidakmampuan para pihak dalam menciptakan peluang untuk berdamai akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.¹⁰

Dalam proses mediasi seorang mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.¹¹ Pada umumnya mediator akan melakukan penjajakan dengan memperkenalkan prosedur dan tahapan mediasi, namun perannya tidak lebih sebagai pemacu yang netral dalam proses

¹⁰D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 27-29.

¹¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2010), h. 34.

interaksi para pihak, hal ini umumnya mencakup bahwa mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak dengan pacuan mediator menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan setiap penyelesaian.¹²

Dalam proses mediasi, peranan komunikasi *verbal* jauh lebih efektif daripada hanya sekedar tukar-menukar berkas atau catatan. Terciptanya komunikasi dua arah yang saling mengisi dengan saran dan masukan-masukan akan membantu secara tidak langsung dalam mencairkan suasana. Upaya-upaya dalam melakukan *stimulasi* untuk menempuh proses perundingan harus terus dilancarkan sampai didapatkan respon yang positif dari para pihak terhadap proses perdamaian. Ingat..., bahwa proses perdamaian yang efektif selalu didahului oleh adanya respon yang positif bagi terciptanya forum komunikasi.

Sebenarnya mediasi merupakan lembaga yang sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi. Pemangku adat atau tokoh-tokoh adat sering menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Konsep mediasi lebih memberikan ruang dan kebebasan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Metode ini dianggap lebih efektif karena dapat dilakukan dengan cara dengan prosedur yang jauh lebih sederhana. Mediasi bukan hanya menyentuh pada pokok persoalan yang

¹²Gerry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Terjemahan Nogar Simanjuntak, Elips, (Jakarta: 1999), h. 248.

disengketakan namun dapat *mereposisi* kondisi yang terganggu diantara para pihak yang bertikai dengan cara-cara yang lebih *familiar*.

Banyak jenis-jenis sengketa yang jika tidak diliputi oleh gesekan emosional sebenarnya mudah untuk diselesaikan, namun karena adanya permasalahan di luar persoalan pokok inilah yang sering menjadi dinding penghalang tercapainya proses perundingan dan negosiasi. Seorang mediator yang handal harus mampu untuk meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang *kondusif*. Dalam kondisi yang normal dan emosi yang stabil akan mudah untuk menggiring semangat para pihak menuju pola penyelesaian yang kita tawarkan, pada fase-fase awal seorang mediator mungkin saja dituntut untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara proaktif, namun setelah suasana menjadi lebih baik dan antusias para pihak sudah mulai terbangun, mediator dapat sedikit mengurangi dominasinya dan mulai memberikan kesempatan untuk membuka komunikasi dua arah atau tiga arah antara para pihak yang bertikai dengan mediator.¹³

C. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya

¹³D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 30.

diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*).¹⁴ Ketentuan itu sejalan dengan firman Allah swt dalam QS al-Hujurat/49:9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁵

Ayat di atas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak di kalangan mereka. Ayat tersebut berkaitan dengan skripsi penulis yakni dikemukakan tentang pentingnya mediasi. Jika ada dua pihak yang berselisih maka damaikanlah mereka sebab perdamaian itu indah karena kedamaian adalah ketentraman. Kemudian mediasi harus dilakukan dengan itikad baik oleh semua pihak. Dalam memediasi para pihak, mediator harus berlaku adil, bersikap jangan memihak agar kesepakatan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, karena memediasi orang adalah pekerjaan yang disukai oleh Allah.

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 151.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Tajwid* (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014), h.516.

Qs. Al-Hujurat/49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat sebelumnya untuk mendamaikan kaum mukmin yang bersengketa. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Persaudaraan itu di ibaratkan dengan satu tubuh, apabila salah satu tubuh sakit maka yang lain juga merasakannya.

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara.¹⁶

¹⁶M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 13, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), h. 249.

Qs. An-Nisa/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas menganjurkan untuk berdamai. Jika tanda-tanda akan terjadi persengketaan atau pertengkaran di antara suami dengan isteri, maka di damaikan oleh hakam/juru damai, dalam hal ini berarti mediator sebagai pihak penengah. Semua upaya damai itu tidak akan terwujud kecuali dibarengi keinginan kuat yang nyata serta niat tulus dari semua pihak, antara juru damai dan yang didamaikan. Sebaiknya sudahi dan hentikanlah pertengkaran atau pertikaian.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi yang artinya:

“Perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada sayarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Ibnu Hibban dan Tirmizi)”.

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan

perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam islam. Orang-orang islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi di pengadilan adalah.

1. HIR Pasal 130 dan RBg 154 BW ayat (1); jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Ayat (2); jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu) surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Ayat (3) keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding. Ayat (4); jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.
2. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. yang pada akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Prinsip-prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).¹⁷

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi.

¹⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28-30.

Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.¹⁸

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai

kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

¹⁸Takdir Rahmadi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011), h. 22.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak. Layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹ Dengan demikian hakekat yang dicari dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan pengintegrasian mediasi ke acara pengadilan adalah “keadilan”,

¹⁹I. Made Sukadana, “*Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan*” Prestasi Pustaka, (Jakarta: 2012), h.112.

karena keinginan kedua pihak dapat terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan, namun sebaliknya kedua belah pihak merasa dihormati sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam yaitu “kejayaan atau gloria” untuk selalu ingin dihormati, selalu ingin lebih unggul dari manusia lainnya.²⁰

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*). sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut.²¹ Pertama Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kedua, otonomi para pihak. Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra aditya Bakri, cet, Ke 6. (Jakarta:2006), h.206. Sebagaimana dikutip oleh I Made Sukardana “*Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan*” Prestasi Pustaka, (Jakarta: 2012)

²¹Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011), h. 154-159.

dengan sebutan *self determination*, yaitu para pihaklah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.

Ketiga, mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan sengketa.

Keempat, Efisiensi Waktu. Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6).

Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak.

Kedelapan, pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan- pertemuan atau sesi-sesi mediasi.

Kesembilan, pengulangan mediasi. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa.

Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur

prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court-connected mediation*). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta. Mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.²²

E. Peran dan Fungsi Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang berlangsung guna

²²Sulaiman, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, diakses pada hari Rabu 16 April 2017

membantu dan memfasilitasi para pihak dalam penyelesaian sengketa itu secara damai, pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan istilah *mediator*.²³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan mediator adalah:

“Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Berpangkal tolak pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk kedalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Kata “netral” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator diantara kedudukan para pihak, lalu sepenting apakah sebenarnya kenetralan posisi mediator dalam proses mediasi? Netral secara sederhana dapat diartikan bahwa seorang mediator tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan para pihak atau salah satu pihak, namun apakah mutlak harus demikian? Jika dalam salah satu kasus ternyata para pihak sepakat untuk memilih seorang mediator yang masih terikat sanak family dengan salah satu pihak apakah tetap diperbolehkan? Sebenarnya jika kita simak fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, maka pengertian “netral” lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan yang seimbang/ tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan

²³D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.87.

dengan salah satu pihak, walaupun itu tetap menjadi hal yang penting dan menentukan.²⁴

PERMA Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁵

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Dalam ayat selanjutnya dikatakan: berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dalam pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung.

Dalam proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan

²⁴D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.88.

²⁵Lihat Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sendiri jalan penyelesaiannya, disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa "*The mediator has no power to impose a decision on the parties*". Hal serupa juga diungkapkan oleh *Mark E. Roszkowsky* yang menyebutkan yang artinya di dalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.²⁶

Timbul pertanyaan apakah jika dalam menentukan bentuk penyelesaian tersebut ternyata mediator menemukan adanya tindakan penyalahgunaan keadaan/kesempatan (*undue influence*) dari salah satu pihak dengan cara memanfaatkan kebodohan atau ketidaktahuan dari pihak lain untuk menentukan bentuk penyelesaian yang sebenarnya akan merugikan bagi pihak lain, mediator harus tetap membiarkannya dengan alasan bahwa mediator hanya berperan sebagai fasilitator? Tentunya pengertian dari prinsip bahwa mediator tidak dapat turut campur dalam menentukan resolusi sengketa di antara para pihak bukanlah berarti sama sekali apatis terhadap kenyataan yang dianggap bertentangan dengan itikad baik, artinya jika bentuk resolusi tersebut dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak makna dan akibatnya, maka mediator harus bersifat pasif, namun jika salah satu pihak ternyata tidak mengerti apa akibat dari proses penyelesaian yang akan diambil, mediator berkewajiban untuk memberitahukannya dan jika setelah diberikan penjelasan secukupnya ternyata para pihak tetap berkehendak memilih bentuk penyelesaian seperti itu, maka mediator juga tidak bisa menghalanginya, sepanjang

²⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2000), h. 33.

isi kesepakatan yang dibuat tidak melanggar Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²⁷

2. Orang Yang Berhak Menjadi Mediator

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pengertian “netral” bukan hanya karena subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak. Netral dapat diartikan juga mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak. Perlakuan yang tidak memihak dalam mendorong partisipasi para pihak harus ditunjukkan oleh mediator ketika sedang mengelola sebuah perundingan. Antusiasme para pihak akan terganggu jika dalam proses perundingan jika dalam proses perundingan ditemukan perlakuan yang tidak adil atau terkesan hendak menguntungkan salah satu pihak.

Mediator harus memosisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi dalam membangun kesepakatan. Ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan kehendak mereka, maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing. Dalam proses tawar-menawar dan

²⁷D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 89.

saling mengajukan konsep, mediator dapat berperan sebagai kendali proses (*rule of the game*) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan.

Pada tahap pra mediasi diawali dengan penjelasan-penjelasan secukupnya dari Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, hal ini merupakan perwujudan dari kehendak undang-undang sebagaimana dituangkan dalam pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian diterjemahkan secara lebih tegas dalam ketentuan PERMA mediasi, pada tahap berikutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator dipengadilan.

Pada prinsipnya daftar mediator yang terpampang di ruang lobby pengadilan tersebut akan memuat beberapa nama mediator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu Hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara;
- b. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.”

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga professional yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁸

Prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang mediator adalah “*netralitas*” sehingga jika mediatornya berasal dari advokat, maka harus advokat di luar penasehat hukum para pihak atau bukan yang tergabung dalam satu *associate/partner* dengan salah satu penasehat hukum dari salah satu pihak. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga netralitas seorang mediator pada saat memfasilitasi para pihak dalam perundingan. Sedangkan bagi mediator yang berasal dari kalangan akademisi hukum dan profesi non hukum, selain juga harus memiliki independensi dengan sengketa para pihak, juga sedikitnya harus memahami tentang persoalan-persoalan hukum, mungkin saja mediator yang berasal dari golongan profesi non hukum memahami

²⁸D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 91.

tentang materi yang disengketakan oleh para pihak, namun jika sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan ketika merumuskan butir-butir kesepakatan damai itu ke dalam bentuk perjanjian. Hal ini akan berkaitan dengan teknik-teknik dalam pembuatan dokumen perjanjian menurut ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Pada prinsipnya para pihak tetap bebas untuk memilih mediator. Artinya para pihak tidak diwajibkan untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator di kantor pengadilan. Seandainya para pihak memiliki mediator sendiri di luar daftar nama yang tertera dalam daftar mediator, sepanjang mediator itu telah memiliki sertifikat, maka dia berhak di pilih oleh para pihak yang berperkara. Daftar mediator dibuat sekedar untuk memudahkan para pihak yang berperkara dalam memilih mediator.

Mediator harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

²⁹D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 96.

³⁰Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. (Jakarta: 2006), h. 134.

- d. Tidak mempunyai hubungan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

PERMA memang tidak mengatur syarat dan kriteria secara personalitas untuk menjadi mediator, namun dengan adanya syarat menurut PERMA Mediasi bahwa orang bertindak sebagai mediator dalam proses perkara di pengadilan adalah mereka yang telah memiliki sertifikat mediator, maka dengan sendirinya syarat dan kriteria personalitas tentunya akan terpenuhi dengan adanya sendirinya karena seseorang bisa mendapatkan sertifikat mediator karena telah memenuhi persyaratan tertentu yang diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000.

3. Tipologi Mediator

Menurut **Christopher W. Moore** mediator memiliki 3 tipe antara lain:

- a. Mediator otoritatif
- b. Mediator *social network*
- c. Mediator *independent*.³¹

³¹Christopher W. Moore, *The Mediation Process Practical Strategies For Resolving Conflict*, 2003. Lihat juga makalah Mas Achmad Santoso dan Wiwik Awiati, *Negosiasi dan Mediasi*, Mahkamah Agung, 2003, h. 23.

a. Mediator Otoritatif

Dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak yang bersengketa (penggugat-tergugat) dan mediator, ketiga komponen tersebut akan terlibat dalam satu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Proses interaksi dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak di luar kendali mediator. Seorang mediator yang memiliki tipe otoritatif akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan dalam beberapa hal mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun.³² Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak menunjukkan sikap pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator.

b. Mediator *social network*

Mediator yang lahir karena proses hubungan/jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari satu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas sosial yang sama.

³²Lawrence M Friedman, *The Legal System a Social Science Perspective*, Nusamedia, h. 50.

c. *Mediator independent*

Mediator independen merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun karena sengketa yang sedang dihadapi. Tipe mediator independen ini merupakan tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan mengingat sifatnya yang independen dan profesional. Mediator independen akan lebih memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.

Mediator independen selain akan terjamin kenetralannya, pada umumnya juga dibekali dengan pengalaman dan keahlian di bidang metode penyelesaian konflik sehingga kinerja mediator independen ini dapat dipertanggungjawabkan secara profesional karena telah dilatih secara khusus untuk menangani proses-proses perdamaian.

4. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Konflik

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan proses terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi

yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakteristik mediator yang efektif antara lain:³³

- a. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan;
- b. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan;
- c. Kemampuan mengekspresikan kemampuan-kemampuan secara verbal;
- d. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas);
- e. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan);
- f. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan;
- g. Integritas (tidak tercela);
- h. Kemampuan mempengaruhi;
- i. Sabar
- j. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan diri dari lawan.

Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang “*terapis negosiasi*”. Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses

³³Mas Achmad Santoso dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: 2003) h. 23 kriteria ini diambil dari karakteristik negosiator yang efektif yang menurut D.Y Witanto memiliki beberapa kemiripan dengan karakteristik mediator yang efektif.

serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat, terdapat beberapa peran penting seorang mediator antara lain:

- 1) Melakukan diagnosa konflik;
 - 2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
 - 3) Menyusun agenda;
 - 4) Memperlancar dan mengedalikan komunikasi;
 - 5) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
 - 6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
 - 7) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
 - 8) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.
- 1) Diagnosa Konflik

Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketa,

kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya. Membentuk pola komunikasi timbal balik secara berimbang akan lebih memudahkan para pihak untuk menyampaikan asumsi-asumsi dan pendapatnya bagi bentuk-bentuk penyelesaian sebagai alternative. Proses tawar-menawar merupakan momentum yang sangat

penting bagi jalan menuju kesepakatan, karena disitulah para pihak dapat mengungkapkan kepentingan-kepentingan kritisnya dengan tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain.

Agar seorang mediator dapat memahami sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak, maka sebaliknya mediator adalah seorang sarjan hukum atau mereka yang memaami tentang seluk beluk dan permasalahan hukum, maka setidaknya adalah seorang professional yang memahami pokok persoalan yang disengketakan. Dalam tahap pengenalan mediator harus membaca dan memahami gugatan agar mudah dalam mempersiapkan rencana-rencana yang berkaitan dengan strategi penyelesaian konflik.

Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang mediator sebelum memulai tahap mediasi antara lain:

- a) Apa yang menjadi latar belakang persoalan;
- b) Mengetahui siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan di antara para pihak;
- c) Apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan hukum yang disengketakan, misalnya perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi;
- d) Apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.

Dari proses identifikasi tersebut, maka mediator dapat menyusun poin-poin penting dan membuat skala prioritas menyangkut poin mana yang harus mendapat

perhatian khusus guna diperdalam cara pemecahan masalahnya, beberapa poin penting tersebut antara lain:

- (1) Identitas para pihak;
- (2) Latar belakang sengketa;
- (3) Kategori/spesifikasi sengketa;
- (4) Landasan hukum sengketa;
- (5) Petitum gugatan.

Dengan adanya diagnosa konflik, maka diharapkan mediator dapat mempersiapkan teknik dan strategi tertentu untuk membentuk forum dan memacu antusias para pihak ke dalam proses komunikasi yang efektif. Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pendekatan yang digunakan tidak harus selalu sama, bagi seorang mediator yang handal akan dapat menentukan metode yang tepat terhadap setiap jenis sengketa.

2) Identifikasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak. Mediator dapat melakukan penelaahan dari uraian dalam posita gugatan untuk melakukan identifikasi dan analisa terhadap kepentingan-kepentingan yang ada, mediator dapat juga melakukan tanya jawab dengan para pihak

yang bersengketa. Hasil identifikasi masalah dapat dimasukkan ke dalam catatan yang telah dibuat dengan kategori-kategori seperlunya.

Jika dalam proses “*diagnosa konflik*” mediator telah mampu mengambil kesimpulan awal berdasarkan asumsi-asumsi, maka dalam identifikasi masalah mediator akan melakukan penelaahan secara lebih mendalam karena pada fase ini mediator sudah mulai melakukan komunikasi verbal secara lebih mendalam dengan para pihak.

Selain pokok permasalahan yang harus mampu diidentifikasi, mediator juga harus mampu untuk melihat dan menginventarisasi kepentingan-kepentingan kritis, apakah kepentingan para pihak berada pada pokok persengketaannya ataukah ada kepentingan lain yang lebih kompleks di balik pokok sengketa. Misalnya dalam sengketa tanah ternyata ditemukan adanya persoalan non hukum seperti adanya persoalan harga diri dan kehormatan yang terserang. Dalam contoh kasus misalnya; diatas tanah objek perkara terdapat makam leluhur dari salah satu pihak sedangkan tergugat pernah melakukan tindakan pada objek sengketa yang dipandang telah merendahkan harga diri dan kehormatan para tergugat. Dalam kondisi seperti itu sulit untuk menerobos langsung ke dalam sengketa hukumnya karena persoalan di luar pokok sengketa lebih mengemuka dan justru lebih rumit dibanding dengan pokok sengketa yang sebenarnya, sebaiknya persoalan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu karena yang menjadi kepentingan kritis dalam sengketa tersebut adalah

masalah kehormatan dan harga diri. Jika tidak diselesaikan lebih dulu, maka sengketa pokok di antara para pihak dapat dipastikan akan menemukan jalan buntu.

Dalam perkara perdata yang pihak-pihaknya (*prinsipalnya*) merupakan orang perseorangan (*naturlijk person*), pada umumnya sengketa yang diajukan ke pengadilan telah diliputi oleh persoalan emosional dan sentimen pribadi sehingga perlu adanya penanganan eksepsionil menyangkut hal tersebut sebelum masuk kepada pokok perkara yang sebenarnya, berbeda dengan perkara perdata yang melibatkan sengketa badan hukum (*recht persoon*), yang pada umumnya hanya terfokus pada objek perkara menyangkut persoalan bisnis belaka, walaupun bukan berarti tidak mungkin hal yang demikian itu juga terjadi pada perkara-perkara yang melibatkan para pihak dari kalangan badan hukum.

Jenis-jenis sengketa yang diajukan ke pengadilan pada umumnya merupakan:

- a) Sengketa menyangkut perbuatan melawan hukum;
- b) Sengketa mengangku wanprestasi;
- c) Sengketa menyangkut pembatalan perjanjian;
- d) Sengketa perceraian;
- e) Sengketa waris, dan sebagainya.

Dari beberapa jenis sengketa perdata yang disebutkan di atas. Sengketa wanprestasi merupakan sengketa yang paling mudah untuk didamaikan, kenapa demikian? Karena dalam perkara wanprestasi mediator bisa langsung membuka ruang

penawaran dalam bentuk nilai-nilai tanpa harus melakukan konversi terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena jumlah utang dan bunga biasanya sudah ditentukan dalam klausul perjanjian, berbeda halnya dengan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang biasanya bentuk tuntutan didasarkan pada selera si penggugat, misalnya nilai kerugian materiil akan di tuntutan setinggi-tingginya dengan harapan jika nanti Hakim menurunkan nilai tuntutan masih berada dalam taraf yang menguntungkan bagi si penggugat. Kesulitan yang pada umumnya terjadi pada jenis perkara PMH adalah ketika para pihak dan mediator harus melakukan konversi nilai-nilai dari bentuk kerugian tertentu ke dalam sejumlah uang yang dianggap rasional. Pada saat itu akan muncul perdebatan menyangkut kelayakan berdasarkan dua persepsi nilai yang berbeda.

3) Menyusun Agenda

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. PERMA Mediasi memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari. Mediator memberikan pilihan kepada para pihak, apakah akan melakukan pertemuan seminggu sekali atau dua kali seminggu tergantung dari kesanggupan para pihak. Berdasarkan agenda yang telah disusun mediator akan menyusun materi pertemuan yang akan di bahas dengan para pihak.

Mediator harus mampu mengefisienkan waktu agar jangan sampai proses mediasi berlarut-larut tanpa hasil. Diharapkan pada setiap pertemuan mediator harus memiliki program kerja dan rencana yang akan dilakukan. Untuk memudahkan dalam melihat jadwal pertemuan, tidak ada salahnya jika dibuat sebuah table/kalender pertemuan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Hari dan tanggal pertemuan;
- b) Tempat pertemuan;
- c) Materi yang dibahas;
- d) Hasil yang dicapai.

Pada awal pertemuan, mediator hanya akan melakukan pengenalan-pengenalan secukupnya, menyampaikan prosedur berdasarkan PERMA Mediasi dan menentukan aturan main (*rule of the game*) agar proses mediasi dapat berjalan lancar. Pada tahapan ini mediator dapat menentukan langkah-langkah bagi kelancaran dan kesuksesan proses mediasi selanjutnya. Di sinilah kesempatan mediator untuk menyampaikan pandangan-pandangan menyangkut keuntungan proses perdamaian dibandingkan proses *litigasi*. Strategi provokasi dan sedikit menakut-nakuti bisa mulai dilancarkan dengan memberikan gambaran-gambaran buruk tentang proses penyelesaian *litigasi*, hal ini dimaksudkan agar tumbuh semangat kepada para pihak untuk menentukan pilihannya kepada proses penyelesaian secara damai.

Usaha mediator untuk membangkitkan antusias para pihak diawali dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama biasanya sudah mampu diagnosis mengenai kemungkinan-kemungkinan adanya persoalan non hukum (harga diri dan sentimen pribadi) yang meliputi sengketa tersebut, jika memang itu ada, maka akan lebih efektif jika mediator melakukan komunikasi dengan pendekatan religius berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh para pihak, misalnya dengan menyampaikan pesan tentang fadzilah silaturahmi dan kemudharatan dari permusuhan. Media dakwah biasanya akan banyak membantu dalam menumbuhkan kesadaran para pihak yang diliputi emosi.

4) Memperlancar dan Mengendalikan Komunikasi

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran yang cukup penting dan menentukan bagi seorang mediator, karena mediator dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan interaksi di antara para pihak. Pada awal pertemuan mediator harus mampu memegang kendali pada proses interaksi dan menciptakan komunikasi tiga arah antara penggugat, tergugat dan mediator. Komunikasi verbal sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan moral yang akan bermanfaat bagi para pihak untuk *berkontemplasi* dan menentukan pilihan pada proses penyelesaian secara damai.

Padap tahap berikutnya, setelah dirasa komunikasi antara para pihak sudah mulai terbentuk, maka mediator secara perlahan-lahan harus mengurangi

dominasinya dan memberikan ruang yang lebih luas kepada para pihak untuk menentukan penyelesaiannya. Di sini mediator akan berperan sebagai moderator yang akan mengendalikan aturan main dalam komunikasi para pihak, masukan-masukan dan saran alternatif tetap selalu dibutuhkan dalam proses komunikasi di antara para pihak, namun secara substantif mediator cukup menjadi pendengar dan pencatat saja, agar butir-butir kesepakatan kelak dapat dituangkan dalam dokumen kesepakatan damai.

Akan sulit untuk membangun komunikasi yang efektif dan interaksi timbal balik jika mediator tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu merangsang respon untuk saling menyanggah peran. Kondisi para pihak pada awalnya pasti akan menghadapi kendala dalam membangun komunikasi, sehingga peran mediator sangat diharapkan untuk bisa mencairkan suasana dengan pendekatan-pendekatan personal yang menyentuh dan familiar. Mediator tidak harus mengawali pembicaraan dengan langsung menyentuh pada pokok sengketa, namun bisa dengan cara melakukan pendalaman personal yang memungkinkan untuk ditemukan celah bagi awal terbangunnya komunikasi tiga arah. Hubungan kekerabatan dan persamaan jenis-jenis komunitas tertentu dapat menjadi media/sarana untuk mempertemukan persepsi kedua belah pihak yang bertikai dalam suatu forum yang lebih baik, jika itu memang ada.

Kaukus merupakan senjata pamungkas bagi mediator dalam membangun komunikasi dua arah yang spesifik dan mendalam dengan salah satu pihak. Pada saat

melakukan kaukus mediator dapat *mengeksplorasi* akar-akar permasalahan yang melatarbelakangi sengketa terjadi. Pendekatan antar individu dapat dibentuk dengan mencari persamaan-persamaan yang dapat menimbulkan simpati dari para pihak. Mediator harus mampu menemukan keinginan-keinginan substansial mulai dari kepentingan primer, sekunder maupun tersiernya, misalnya walaupun sengketa dalam gugatan yang diajukan adalah mengenai perebutan sebidang tanah, namun kepentingan primernya belum tentu itu, misalnya ternyata persoalan primernya adalah perasaan harga diri sehingga kebutuhan yang paling mendesak sebenarnya adalah perkataan maaf dari pihak tergugat kepada pihak penggugat, maka dengan terpenuhinya kepentingan-kepentingan primer dari akar permasalahan yang terjadi, akan menjadi alasan yang mulus untuk mempertemukan persepsi para pihak terhadap permasalahan yang lain dalam proses penawaran dan negosiasi lanjutan.

Tujuan utama masuknya pihak mediator ke dalam sengketa yang terjadi adalah untuk membantu proses komunikasi antara para pihak yang bertikai, karena dengan diajukannya gugatan ke pengadilan disebabkan karena para pihak tidak mampu melakukan negosiasi sendiri, sehingga permasalahan tidak mampu diselesaikan dengan baik. Gagalnya proses negosiasi banyak diakibatkan oleh karena para pihak tidak memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif, mungkin karena terganjal oleh gesekan emosional dan sentimen pribadi yang mengakibatkan timbulnya sifat egois dan ingin menang sendiri. Dalam proses

mediasi mediator akan hadir sebagai pihak yang akan menyelaraskan keinginan-keinginan pihak secara adil dan berimbang.

5) Membimbing untuk Melakukan Tawar Menawar dan Kompromi

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan-keinginan *non substansial*, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan penawaran dengan nilai atau ukuran yang lebih lunak dibandingkan dengan nilai yang tertera di dalam gugatan, artinya harus ada perlunakan dalam proses penawaran dengan penurunan jumlah tuntutan, sedangkan dilain pihak tergugat juga harus memberikan penawaran yang realistis atas kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai dengan batas-batas yang ia miliki.

Selain ada beberapa penawaran, mediator akan mengelola dan menyusun penawaran itu agar saling bertemu, jarak yang terlalu jauh sering menjadi hambatan dalam mempertemukan kehendak para pihak. Ketika terjadi kondisi seperti itu dan mengarah pada kemungkinan terjadinya *dead lock*, maka mediator harus menggali kembali kemungkinan-kemungkinan untuk diajukan bentuk penawaran yang baru di luar bentuk yang telah dikemukakan, misalnya penawaran penggugat masih terlalu tinggi dari ukuran kemampuan tergugat, maka terpaksa mediator harus melakukan pendekatan secara khusus bila perlu dengan kaukus kepada pihak penggugat agar bisa memperlunak keinginannya itu, karena sikap keras dan bertahan pada pendirian seperti itu hanya akan menghambat proses perdamaian. Disisi lain tergugat juga harus

terus terpacu semangatnya agar berani berkorban dan mampu mengambil keputusan dalam mengakseptasi penawaran.

Dalam tahapan mediasi diperlukan adanya penawaran kooperatif dimana antara para pihak bisa saling memberikan bentuk penawaran untuk tujuan dan kepentingan bersama. Menurut **Gerry Goodpaster** penawaran kooperatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu tawar-menawar kompromi dan tawar menawar integrative, selanjutnya dijelaskan bahwa di antara keduanya terdapat kemiripan-kemiripan dan keduanya terkadang menggunakan beberapa teknik yang sama. Namun masing-masing berbeda dalam tujuan dan kelihatan lain maksud dan pendekatannya.³⁴

Motivasi bersama untuk mencapai proses penyelesaian merupakan modal utama dalam menjalani proses tawar-menawar, pertentangan kepentingan mungkin saja terjadi pada proses penawaran pertama, karena pada penawaran pertama sering diliputi oleh tindakan spekulatif dan untung-untungan. Realita kepentingan yang sebenarnya akan terlihat setelah dilakukan kompromi dan saling mengukur respon dari pihak lawan. Proses mediasi ditujukan untuk mencari persamaan dan *mereduksi* perbedaan-perbedaan, setiap indikator yang dapat membangun kesamaan harus terus inventarisir walau sekecil apapun, sebaiknya indikator yang mengarah kepada perbedaan persepsi dan pertentangan kepentingan harus *dieliminir*.

³⁴Gerry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Terjemahan Nogar Simanjuntak, Elips, (Jakarta: 1999), h. 75.

Dalam proses tawar menawar memang harus ada strategi tarik ulur dan *bargaining position*, biasanya pihak yang merasa memiliki bukti kuat akan menggunakan itu sebagai senjata penekan yang akan melemahkan posisi tawar pihak lawan, ini harus diantisipasi oleh mediator agar kondisinya tidak terlalu menjadi dominan, karena akan mempengaruhi semangat pihak lawan dalam melakukan kompromi terhadap sebagian nilai tawarnya.

6) Mengumpulkan Informasi Penting

Adakalanya mediator harus bertindak sebagai pencatat data-data dan informasi penting dari perundingan yang berlangsung, hal ini akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai mauk pada tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati dapat di *recovery* ke dalam bentuk klausul perjanjian. Pada jenis engketa yang sederhana mungkin pencatatan dan pendataan tidak sepenting dibanding pada perrkara-perkara yang rumit, namun walaupun demikian ada baiknya mediator tetap melakukan pencatatan seperlunya agar jika di kemudian hari diperlukan dapat menjadi data yang akurat.

Dalam percakapan biasanya tidak didasari bahwa telah disepakati beberapa hal yang menyangkut sub-sub permasalahan yang disengketakan, namun karena mengalir begitu saja sehingga apa yang telah dibicarakan menjadi bias dan tidak fokus, karena tidak dibuat dalam suatu catatan. Mediator harus jeli dalam melihat isi perundingan yang terjadi, sub persoalan yang telah disepakati tidak usah dibuka lagi

dalam forum, namun cukup dicatat dalam notulensi mediator, sehingga pada saat akan dibuat butir-butir kesepakatan, mediator akan lebih mudah untuk *me-recovery* kembali semua item yang telah disepakati.

Informasi penting dapat digali dari beberapa sumber antara lain:

- a) Surat gugatan;
- b) Keterangan pihak-pihak;
- c) Alat-alat bukti yang mungkin diajukan oleh para pihak;
- d) Keterangan ahli bila para pihak menghendakinya.

Keterangan pihak-pihak, merupakan informasi yang paling menentukan karena dapat melumpuhkan bukti-bukti yang ada. Sikap kerelaan untuk mengalah dalam beberapa hal mungkin saja akan mengesampingkan atau bahkan mengeliminir pembuktian, karena proses mediasi memang sifatnya selalu dimungkinkan untuk mengesampingkan bukti-bukti.

Informasi-informasi penting yang mendukung proses penyelesaian ke arah perdamaian akan di inventarisir sedangkan informasi yang bersifat *provokatif* dan betentangan dengan misi perdamaian harus di kesampingkan. Dalam proses tukar menukar informasi dibutuhkan adanya kepercayaan dari kedua belah pihak karena proses ini akan bermuara pada keikhlasan dan motivasi untuk menyepakati perundingan secara damai.

7) Penyelesaian Masalah dengan Pilihan-pilihan

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Pilihan yang diajukan berasal dari hasil *assessment* dari pokok-pokok sengketa yang dirundingkan.

Mediasi pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan moral bahkan bisa juga menempuh pendekatan religious yang pada akhirnya mengharapkan adanya kerelaan dan keikhlasan dari para pihak yang sedang melakukan perundingan untuk saling mengerti kepentingan satu sama lain. Bentuk *legal statement* terkadang justru tidak diperlukan dalam proses mediasi, karena pendekatan seperti itu dianggap tidak cocok untuk digunakan dalam proses perdamaian, sehingga mungkin saja terjadi sesuatu yang dipandang rugi dalam ukuran bisnis namun dianggap untung dalam pandangan yang lain.

Pada tahap penyelesaian masalah hasil kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk akta (dokumen), para pihak akan saling mengekspresikan kepentingannya dalam butir-butir kesepakatan. Bentuk perjanjian konsensusil dapat menjadi formulasi dalam perkara yang menyangkut wanprestasi. Butir-butir kesepakatan dalam akta perdamaian dapat menjadi revisi atau pembaharuan perjanjian (novasi) dari perjanjian sebelumnya.

5. Fungsi Mediator

Mediator menurut *Fuller*³⁵ memiliki beberapa fungsi antara lain:

a. Sebagai Katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator tidak hadir untuk memberikan keputusan dan kesimpulan, kehadirannya tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama. Pihak-pihak yang bertikai merupakan klien yang harus diberikan motivasi untuk berdamai dan mencoba meredakan ketegangan yang terjadi di antara para pihak. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

Tidak penting bagi mediator untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum perundingan, mengesampingkan kondisi yang benar dan salah merupakan cara yang efektif untuk menciptakan prioritas pada konsep resolusi yang telah direncanakan. Tidak heran jika para pihak pada awalnya menunjukkan sikap yang apatis terhadap proses perundingan karena belum terbangun antusias untuk itu. Seorang katalisator

³⁵Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute For Conflict Transpormation (IICT) 2008, h. 16.

harus mampu mengubah kondisi itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang, penjelasan-penjelasan mengenai keuntungan penyelesaian secara damai dapat menjadi bahan dan topik pembicaraan awal ketika membuka pertemuan pertama. Keuntungan dalam menggunakan jalur mediasi dan kerugian dalam menggunakan jalur litigasi dapat disampaikan dengan pendekatan informatif, sehingga dapat membangun asumsi para pihak terhadap proses penyelesaian secara damai.

Mediator wajib mendorong lahirnya ide-ide yang *konstruktif* bagi terciptanya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang *destruktif* melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Untuk dapat menelusuri dan menggali kepentingan-kepentingan para pihak dengan berbagai opsi untuk menjadi alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.³⁶ Hanya para pihak yang tahu akan kepentingan dan persoalan yang sebenarnya, sehingga mereka sendiri yang harus pro aktif dalam melakukan penggalan terhadap berbagai kepentingan dan titik persoalan dalam sengketa yang terjadi. Mediator hanya akan menjadi fasilitator dalam memberikan ruang dan merangsang para pihak untuk aktif melakukan komunikasi timbal balik dalam merumuskan kesepakatan damai bagi penyelesaian masalah yang dihadapi.

³⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-4. Sinar Grafika (Jakarta, 2006). h. 263.

b. Sebagai Pendidik

Jika kondisi konflik sangat memerlukan seorang pihak ketiga untuk menjadi penengah, maka peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik (*educator*), yang mampu memberikan arahan dan nasehat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.³⁷ Cukup penting bagi mediator untuk mengondisikan para pihak agar menyadari akan kekhilafannya. Mediator dapat mencontohkan sebuah keteladanan yang bisa menyentuh perasaan para pihak, metode komunikasi harus bersifat persahabatan, dan menghindarkan kesan-kesan yang formal dan kaku. Semakin rileks proses perundingan yang dilakukan, maka akan semakin memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam menyerap setiap alur komunikasi yang dibangun oleh mediator.

c. Sebagai Penerjemah

Tidak semua usulan dalam bentuk konsep dapat dimengerti oleh para pihak yang sedang terlibat proses perdamaian. Apalagi jika para pihak berasal dari golongan orang yang tidak begitu memahami materi hukum. Dalam kondisi seperti itu seorang mediator harus mampu menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak ke dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti.

³⁷Pengantar Mediasi, www.images.dalyerni.multiply.com

Kesepakatan damai harus dibentuk dengan kehendak yang murni dan sempurna, murni berarti kehendaknya tidak diliputi oleh hal-hal yang dapat merusak kebebasannya dalam menyatakan kehendak dan kehendak yang di nyatakan itu harus benar-benar sempurna artinya bahwa kehendak itu harus didasarkan atas pemahaman dan pengetahuannya terhadap sesuatu yang menjadi hal dalam materi kesepakatan itu.

Hal terpenting dari peranan mediator sebagai seorang penerjemah adalah ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan dan konsep penawaran, maka mediator harus mampu untuk menerjemahkan keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti.

Ketika salah satu pihak mengambil keputusan untuk sedikit mengalah, maka pihak tersebut harus memahami akibat dari keputusan yang diambilnya itu, sehingga tidak terjadi *miss understanding* terhadap pengambilan keputusan penting dalam proses perundingan. Berkaitan dengan hal itu mediator harus mencermati setiap keadaan agar jangan sampai terjadi kondisi dimana salah satu pihak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk merelakan haknya secara tidak seimbang, misalnya dalam suatu sengketa tanah penggugat menuntut agar tergugat menyerahkan beberapa bidang kepada penggugat, kemudian penggugat dan tergugat bersepakat untuk membagi dua bidang-bidang tanah tersebut, sebelum melakukan pembagian masing-masing pihak harus memahami terlebih dahulu tentang harga pasaran pada bidang-bidang tanah

tersebut. Jangan sampai terjadi kerugian terhadap salah satu pihak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan tentang harga pasaran yang ada, sehingga nilai pembagian tersebut menjadi tidak adil.

d. Sebagai Narasumber

Fungsi mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, maka seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi. Adakalanya para pihak akan bertanya kepada mediator tentang hal-hal menyangkut prosedur dan tata cara proses perundingan maupun tentang materi pokok dalam sengketa yang terjadi. Walaupun fungsi pokok mediator berbeda dengan penasihat hukum, namun setidaknya mediator dapat memberikan solusi dan penjelasan secukupnya mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi. Jika mediator tidak mampu untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang menjadi kendala, maka para pihak dapat meminta bantuan seorang atau beberapa orang ahli untuk menjelaskan tentang persoalan tertentu yang tidak dipahami oleh para pihak.

Mediator harus membatasi diri terhadap persoalan yang berbeda di luar kompetensinya ketika memberikan penjelasan-penjelasan tertentu. Lebih baik mediator menyarankan kepada para pihak untuk memanggil ahli daripada keliru

dalam memberikan penjelasan kepada para pihak, karena hal itu akan menyesatkan dan memperkeruh persoalan. Jika persoalan yang dimintakan penjelasan adalah tentang prosedur mediasi, maka mediator adalah orang yang paling berkompeten untuk menjelaskannya, sehingga dia harus memberikan penjelasan secara gamblang tentang tahapan-tahapan prosedur dan mekanisme dalam proses mediasi.

e. Sebagai Penyandang Berita Jelek

Menjadi pihak yang berada di tengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menerima resiko menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk menggertak pihak lawan melalui perantaraan mediator. Dalam kaitannya dengan fungsi mediator sebagai penyandang berita jelek, mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak.

Berbagai jenis informasi harus di inventarisir dan dinetralisasi dengan pola komunikasi yang baik, latar belakang sengketa yang bertendensi sentiment pribadi merupakan persoalan yang paling dominan dalam membentuk perang propaganda. Mediator tidak boleh terpancing untuk hanyut dalam pertengkaran para pihak namun justru harus mampu membalikkan situasi menjadi kondusif dan terarah. Ejekan dan penekanan-penekanan dengan menggunakan alibi sepihak akan bermunculan pada beberapa tahapan proses, karena masing-masing pihak akan berusaha untuk

mengendalikan situasi, namun mediator jangan sampai kehilangan kendali dengan tetap melakukan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap dominasi alibi secara tidak berimbang.

Kemampuan mediator dalam mereduksi informasi negatif akan membantu kelancaran dalam menuju tahap yang lebih menguntungkan bagi terlaksananya forum komunikasi yang efektif. Saran yang konstruktif dalam bentuk usul-usul penyelesaian harus di optimalkan dalam setiap tahapan proses.

f. Sebagai Agen Realitas

Beberapa tahapan penting akan dilalui oleh seorang mediator, salah satu tahapan itu adalah ketika seorang mediator harus berterus terang tentang kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik yang berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri. Sebelum melakukan penyaluran informasi secara timbale balik, maka sebaiknya mediator membuat pemilihan-pemilihan terhadap informasi yang diterima, hal yang penting untuk disampaikan harus disampaikan dengan bahasa penyampaian yang lebih baik dan sebaliknya mediator berhak untuk mendominasi informasi provokatif dan tuduhan yang dirasa tidak penting untuk menghindari reaksi negative dari pihak lawan.

Ketika dilakukan kaukus akan banyak didapatkan informasi yang bersifat realitas, hal itu harus dikemas menjadi bahan acuan dalam mengelola proses tawar-

menawar dan kompromi. Fungsi mediator sebagai agen realitas dapat dilakukan jika mediator dapat menjadi pendengar yang baik dalam proses interaksi verbal. Selain dari pernyataan secara lisan, kondisi realitas dapat disampaikan melalui tulisan-tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah kenyataan.

g. Sebagai Kambing Hitam

Dalam setiap konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat diakseptasi oleh pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang kesemuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator, kondisi seperti ini harus disadari oleh seorang mediator dengan terus berusaha mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan. Mediator juga harus menjaga agar dalam proses pinteraksi para pihak tidak terlibat perdebatan kusir yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas :

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;

- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - i. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - ii. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 - iii. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dalam menyampaikan kepa hakim pemeriksa perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

F. Prosedur Mediasi di Pengadilan

Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1, dinyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pasal 2 ayat (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Ayat (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis perkara wajib menempuh Mediasi, dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan; Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Ayat (2), Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pada Pengadilan Negeri, proses penyelesaian sengketa terdiri dari dua tahap, yaitu:³⁸

1) Tahap Pra Mediasi.

Dalam tahap ini penggugat terlebih dahulu memasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, kemudian gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri. Ketua Majelis Hakim segera menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dengan mengetuk palunya di atas meja satu kali. Pada hari sidang pertama menghadirkan para pihak yang bersengketa. Sedangkan apabila pihak yang bersengketa tidak hadir.

³⁸Sulaiman, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Sugguminasa (7 desember 2016).

Majelis Hakim menunda jalannya persidangan kemudian memberikan kesempatan untuk pihak yang bersengketa agar hadir dalam sidang berikutnya.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara menerangkan bagi para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (PERMA), mewajibkan hakim untuk menempuh jalan mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata.

2) Tahap Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, majelis hakim memberikan penjelasan bahwa batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi adalah, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. Ayat (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Ayat (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Pasal 30 ayat (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator. Ayat (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak. Ayat (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Selanjutnya dalam ayat (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pasal 33 ayat (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Ayat (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Ayat (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat. Ayat (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

G. Manfaat Mediasi

Penyelesaian perkara melalui perdamaian, apakah itu dalam bentuk *mediasi*, *konsiliasi*, *expert determination*, atau *mini trial* mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting diantaranya:³⁹

1) Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekuatan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

2) Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

³⁹M. Yahya harahap, *HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika 2005) h, 236.

3) Jangka Waktu Penyelesaian Pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat), antara 5-6 minggu.

4) Biaya Ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem pengadilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*).

5) Aturan Pembuktian Tidak Perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

6) Proses Penyelesaian bersifat Konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat konfidensial:

- a. Penyelesaian tertutup untuk umum,
- b. Yang tahu hanya mediator maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.

Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

7) Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif

Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerjasama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

8) Komunikasi dan fokus Penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the past*) tapi untuk masa akan datang (*for the future*).

9) Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur:

- a. Sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri,

- b. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

10) Bebas Emosi dan Dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan alasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang menggunakan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

¹Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.

C. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).² Dalam hal ini Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu hakim mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2. Dokumentasi

Yaitu Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa seperti data perkara yang dimediasi, laporan hasil mediasi, data yang berhasil di mediasi serta undang-undang terbaru yang berkaitan dengan pembahasan ini, kemudian Penulis mempelajari, menelaah, dan menganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.

3. Observasi

Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si peneliti. Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah:

1. Daftar pertanyaan;
2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas;
3. Alat rekam.

E. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut

keperluan mereka.³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara hakim mediator di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan data mediasi dalam buku induk register perkara perdata.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam bentuk buku, jurnal, majalah. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasiakn maupun yang belum dipublikasikan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan

³Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143

kepada orang lain.⁴ Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam dengan cara sistematis.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan Bahan Referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara dan observasi yang telah ditemukan oleh peneliti.

⁴Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai tempat penelitian, dengan populasi warga masyarakat yang ada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa.

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa

Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa disidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 1 Ayat (4) tertulis “Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara, dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 151), diubah

menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga wilayahnya meliputi :

- a. Daerah Tingkat II Mamudju,
- b. Daerah Tingkat II Madjene,
- c. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa,
- d. Daerah Tingkat II Tana Toradja,
- e. Daerah Tingkat II Pinrang,
- f. Daerah Tingkat II Enrekang,
- g. Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang,
- h. Daerah Tingkat II Soppeng,
- i. Daerah Tingkat II Barru,
- j. Daerah Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan,
- k. Daerah Tingkat II Maros,
- l. Daerah Tingkat II Gowa,
- m. Daerah Tingkat II Takalar,
- n. Daerah Tingkat II Jeneponto,
- o. Daerah Tingkat II Bantaeng,
- p. Daerah Tingkat II Bulukumba,
- q. Daerah Tingkat II Selayar,
- r. Daerah Tingkat II Sinjai,
- s. Daerah Tingkat II Bone,

- t. Daerah Tingkat II Wajo,
- u. Daerah Tingkat II Luwu,
- v. Kotapraja Pare-Pare dan,
- w. Kotapraja Makassar.

Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pada Pasal 25 tertulis “Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II.

Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.

Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sulsel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah

Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Makassar sampai dengan tahun 1970-an.

Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari Kelas II menjadi Kelas I. Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005.

2. Ketua Pengadilan Dari Masa Ke Masa

- a. ABDUL MADJID, SH., MH (Tahun 1964 - 1971).
- b. M. SIRINGO RINGO (Tahun 1971 - 1980).
- c. MANNAN RAHMAN, SH (Tahun 1980 - 1986).
- d. I KETUT GALUNG ASTIKA, SH (Tahun 1986 - 1990).
- e. MARSOEDI TJOKRO WASKITO, SH (Tahun 1990 - 1993).
- f. H. M ARSYAD SANUSI, SH (Tahun 1993 - 1996).
- g. MUHAMMAD, SH (Tahun 1996 - 1998).
- h. ANDI NORMA, SH (Tahun 1998 - 1999).
- i. H. A. MUH. YUNUS P., SH (Tahun 1999 - 2004).
- j. HANIZAH IBRAHIM M., SH. (Tahun 2004 - 2005).
- k. H. LEXSY MAMONTO, SH., MH. (Tahun 2005 - 2007).
- l. AGUS BUDIARTO, SH., MH. (Tahun 2007 - 2008).
- m. ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH (Tahun 2008 - 2011).
- n. ENNID HASANUDDIN, SH., CN., MH (Tahun 2011- 2012).
- o. HERDI AGUSTEN, SH., M.HUM (Tahun 2012 - 2013).
- p. TAHSIN, SH., MH (Tahun 2013 - 2014).
- q. H. MINANOER RACHMAN, SH., MH (Tahun 2014 - 2016).
- r. MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, SH., MH (Tahun 2016 sampai sekarang)

B. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan murah. Dengan diusungnya konsep mediasi ke dalam proses perkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

Memang dalam proses penyelesaian sengketa perdata diwajibkan mediasi. Mediasi itu juga dasar hukumnya dalam Rbg sudah diatur hukum acara bahwa setiap perkara harus dimediasi tapi kalau dulu pengaturannya dalam HIR dan Rbg tidak diatur secara spesifik tentang tata cara mediasi. Kemudian pada tahun 2008 diatur

secara spesifik melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang kemudian sekarang diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Pada prinsipnya mediasi yang sekarang ini dipimpin oleh seorang mediator. Mediator itu sendiri bisa mediator dari kalangan hakim, bisa mediator diluar kalangan hakim yang sudah bersertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan yang bersangkutan. Walaupun mediator memiliki sertifikat tetapi dia tidak terdaftar sebagai mediator di pengadilan yang bersangkutan maka tidak bisa.¹

Tentang peran mediator dia memimpin jalannya proses mediasi. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi karena mediator berperan sebagai orang yang memimpin mediasi yang pada prinsipnya dia mengarahkan proses mediasi itu seperti apa, dia menjelaskan proses mediasi itu seperti apa, dia memberikan semacam pandangan kepada para pihak baik penggugat ataupun tergugat apa itu yang dimaksud mediasi, tawaran-tawaran mediasi seperti apa. Jadi peran mediator sangatlah penting karena mediasi tidak akan jalan tanpa ada seorang mediator.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA pada

¹Sigit Triatmojo (36 Tahun), Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Mei 2017.

saat merumuskan PERMA tersebut, sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan.

Menurut **Gatot Sumartono** terdapat 3 (tiga) kemungkinan berhasilnya proses mediasi antara lain:

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui selama berjalannya diskusi-diskusi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani sebuah dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru (ingat: dalam praktik dapat terjadi para pihak menolak untuk masuk pada perjanjian yang mengikat setelah mereka merasa puas karena telah berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang disengketakan).
3. Kadang-kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya jika mereka

ingin meneruskan dan mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik dimana pembicaraan sebelumnya ditunda.²

Alur proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1. Pendaftaran perkara perdata gugatan ke Pengadilan Negeri
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
3. Sidang pertama, hakim pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak
4. Pemilihan mediator;
 - a. Penunjukan Mediator atas dasar kesepakatan para pihak
 - b. Penunjukan Mediator oleh Hakim Ketua Majelis
5. Penyerahan resume perkara kepada mediator
6. Proses mediasi, berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Dapat diperpanjang selama 30 hari dan berdasarkan permintaan para pihak kepada hakim pemeriksa dapat diperpanjang lagi.

²Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 150.

7. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari:
 - a. Mediasi berhasil
 - b. Mediasi berhasil sebagian
 - c. Mediasi tidak berhasil
 - d. Mediasi tidak dapat dilaksanakan
8. Majelis hakim pemeriksa perkara:
 - a. Mediasi berhasil
 - 1) Akta perdamaian (*acta van dading*)
 - 2) Penetapan tentang pencabutan gugatan
 - b. Mediasi berhasil sebagian
 - 1) Akta perdamaian (*acta van dading*) yakni kesepakatan perdamaian antara sebagian pihak yang berperkara dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.
 - 2) Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara
 - a) Dalam hal kesepakatan perdamaian hanya menyangkut sebagian objek gugatan,
 - b) Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh kedua pihak yang berperkara,

- c) Majelis hakim memeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- c. Mediasi tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan
 - 1) Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara
 - a) Akibat hukum para pihak tidak beritikad baik
 - (1) Putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
 - i. Dalam hal penggugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 22 Perma No 1/2016)
 - ii. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator (Pasal 23 Ayat (8) Perma No 1/2016)
 - (2) Biaya mediasi dibebankan kepada tergugat
 - i. Dalam hal tergugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik.
 - ii. Penetapan membuat amar yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan membebankan biaya mediasi kepadanya (Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) huruf a,b,c Perma No 1/2016).

Prosedur dari penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada praktiknya sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua perkara perdata yang ada di pengadilan negeri Sungguminasa telah dimediasi terlebih dahulu, namun dalam

buku induk register perkara perdata ada beberapa perkara yang tidak di mediasi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Amiruddin Mahmud menyatakan bahwa perkara tanpa melalui proses mediasi biasanya karena diputus verstek, tanpa kehadiran pihak tergugat. Atau gugatan dicabut sebelum persidangan dimulai.³

C. Faktor Penghambat Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Hasil penelitian dan observasi yang penyusun lakukan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menunjukkan bahwa proses perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 seringkali mengalami kegagalan. Kegagalan inilah yang kemudian di evaluasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA terbaru yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan yang merupakan tindak lanjut perbaikan dari PERMA sebelumnya dengan harapan agar proses mediasi bisa berjalan lebih baik dengan penyelesaian secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat selama proses mediasi. Proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan beberapa hal antara lain:⁴

³Amiruddin Mahmud (34 Tahun), Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Mei 2017.

⁴D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 204-212.

1. Ketidakhadiran Para Pihak

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti para pihak. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Jadi, jika mediasi ingin segera terlaksana dan berjalan dengan baik serta dapat selesai tepat waktu dengan memperoleh hasil yang maksimal, maka hendaklah para pihak yang bersengketa untuk lebih perhatian dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi, yaitu dengan hadir dalam pertemuan mediasi.⁵

⁵Restami Milana, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015, h. 53).

2. Melewati Batas Waktu

Alasan kedua yang dapat menimbulkan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewat. Menurut Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa:

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Sedangkan Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dari ketentuan di atas mengatur tentang batas waktu pelaksanaan mediasi antara lain:

- a) Proses mediasi berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dipilih atau ditunjuk mediator;
- b) Jika para pihak menghendaki proses mediasi dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu 30 (tiga puluh) hari berakhir.

Sebenarnya PERMA telah mengatur waktu pelaksanaan mediasi dengan sangat luas. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan, bahwa jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan damai di pengadilan tingkat pertama, maka pada proses upaya hukum para pihak masih bisa meminta waktu kembali untuk melakukan proses mediasi, misalnya pada saat pemeriksaan banding, kasasi maupun peninjauan

kembali, para pihak masih bisa mengajukan waktu lagi melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.

3. Proses Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari salah satu pihak manapun atas prakarsa mediator.

4. Adanya Kurang Pihak

Proses perdamaian pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara, sehingga dalam proses perdamaian harus melibatkan keseluruhan pihak yang terkait dengan sengketa yang diperdamaikan agar setelah hasil kesepakatan itu dikuatkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul sengketa baru di kemudian hari karena terdapat pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut. Jika dalam proses perdamaian terdapat pihak-pihak yang seharusnya terlibat, namun ternyata tidak turut dilibatkan maka proses perdamaian tersebut menjadi kurang pihak.

5. Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi

Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan dihadapan Hakim Pemeriksa Perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai tersebut, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasinya telah gagal.

Menurut Amiruddin Mahmud dan Sigit Triatmojo faktor utama yang menghambat proses mediasi di pengadilan yaitu:

1. Faktor penghambat proses mediasi di pengadilan biasanya para pihak setiap datang ke pengadilan membawa ego sektoral masing-masing. Yang dimaksud ego sektoral yaitu para pihak merasa dia punya hak. Sehingga dengan ego sektoral yang begitu tinggi menutupi rasa ingin berdamainya. Jadi itulah fungsi seorang mediator. Mediator harus bisa menekan ego setiap pihak, sehingga para pihak itu ingin berdamai. Setiap pihak ketika disidang rata-rata mengatakan tidak ingin berdamai karena ini hak punya saya, saya punya bukti. Nah, itulah peran seorang mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam proses mediasi, dia harus mampu menciptakan untuk menekan ego sektoral para pihak itu, sehingga kalau dia mampu menekan pasti situasi proses mediasi itu bisa berjalan tapi kalau seumpama para pihak keras hati atau kepala batu juga tidak akan berhasil. Jadi intinya seorang

mediator itu juga harus lincah, punya wawasan luas, fleksibel, dia harus mampu manajemen waktu, mampu menelusuri, mendalami hati dari para pihak.⁶

2. Faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan yang pertama dalam PERMA No 1 Tahun 2016 diwajibkan para pihak yang bersengketa langsung untuk hadir. Misalnya dalam perkara seseorang menunjuk pengacara, tetapi dalam PERMA terbaru prinsipalnya mengharuskan para pihak untuk hadir meskipun dia telah menunjuk kuasa. Jadi biasanya yang menjadi penghambat adalah para pihak itu sendiri yang tidak ingin hadir dalam persidangan. Maka disitulah peran mediator menjelaskan tentang pentingnya kehadiran kedua pihak.⁷

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di pengadilan negeri Sungguminasa dilatarbelakangi oleh faktor gengsi belaka. Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng yang kokoh untuk enggan memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi. Contohnya saja sengketa tanah, kadang luas tanah yang diperebutkan tidak seberapa namun karena

⁶Sigit Triatmojo (36 Tahun), Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Mei 2017.

⁷Amiruddin Mahmud (34 Tahun), Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Mei 2017.

harga diri yang begitu tinggi sehingga para pihak memilih untuk tetap melanjutkan ke proses litigasi.⁸

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, dalam pengamatan penyusun selama melakukan penelitian bahwa yang menghambat proses mediasi di pengadilan juga disebabkan oleh mediator. Dimana para pihak cenderung memilih mediator dari hakim pengadilan Sungguminasa bukan hakim mediator dari kalangan luar pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediator meskipun juga tersedia mediator yang bersertifikat di Pengadilan Negeri Sungguminasa namun masih kurang sehingga untuk memenuhi ketersediaan mediator hakim maka Ketua pengadilan Sungguminasa mengangkat beberapa hakim yang ada di lingkungan pengadilan untuk menjadi mediator. Para pihak cenderung mengiyakan untuk memilih mediator yang ada di Pengadilan atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan siapa yang akan menjadi mediator pada saat mediasi, ini menunjukkan bahwa para pihak hanya menganggap mediasi hanya sekedar prosedur yang harus dilalui untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya bukan hal penting untuk dipertimbangkan. Sangat penting untuk seorang hakim mediator untuk mengikuti pembekalan mediasi, karena untuk menjadi mediator dibutuhkan keterampilan (skill) melalui pembekalan khusus mengenai mediasi.

⁸D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 28.

Dengan mengikuti pembekalan mengenai mediasi diharapkan mereka akan lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya dan keuntungan lain mereka memahami mengenai seluk beluk proses mediasi yang benar, baik itu dari menjelaskan kepada klien mengenai keuntungan dari mediasi sampai dengan teknik bermediasi yang baik. Hal ini dikarenakan mediator yang telah menjalani pelatihan mediator sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana mereka diberi pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik, serta panduan untuk melakukan mediasi yang baik dan benar. Sehingga ketersediaan mediator yang mengikuti pembekalan mengenai mediasi akan semakin memperbesar keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga di pengadilan masih sangat rendah. Banyak faktor yang menghalangi keberhasilan dalam mencapai kesepakatan, misalnya: karena sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak untuk membentuk forum komunikasi, atau karena mediator belum memahami teknik-teknik penyelesaian konflik yang baik sehingga kurang bisa memacu para pihak untuk dapat menempuh perundingan. Faktor yang disebutkan terakhir banyak dialami oleh para mediator dari kalangan Hakim Pengadilan yang sebelumnya tidak memiliki basis pendidikan khusus di bidang resolusi konflik.

Faktor penghambat mediasi kemudian telah ditutupi dengan hadirnya PERMA No 1 tahun 2016. Kalau ada pihak yang tidak datang maka harus disertai dengan alasan, kalau seumpama sakit maka harus ada surat keterangan sakit. Kalau seumpama sibuk dengan pekerjaan kantor maka bisa melalui telepon. Intinya diusahakan bertemu dan ada kesepakatan.

D. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pada prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkan. Jadi yang menjadi tolak ukur efektif, kalau misalkan mediasi itu berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya. Tapi persoalan efektif atau tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khasanah untuk berdamai.⁹

⁹Sigit Triatmojo (36 Tahun), Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Mei 2017.

Jika mediasi berhasil berarti ada kesepakatan yang dibuat bersama. Efektif berarti perundingan jalan, penggugat mengeluarkan solusi-solusi begitupun dengan tergugat, apabila perundingan berhasil maka kesepakatan mereka kemudian dibuat dalam akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat para pihak selanjutnya dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim yang kemudian dikuatkan dalam putusan. Persidangan tidak akan dilanjutkan lagi, tidak ada pembuktian, jadi mediator menyampaikan bahwa mediasi berhasil dan telah selesai, hakim memeriksa dan disidang selanjutnya langsung diputuskan maka perkara akan selesai. Sedangkan apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim.

Jadi tolak ukur efektif atau tidaknya itu banyak tergantung penilaian, secara kasat mata mediasi berhasil berarti efektif. Tapi dari segi prosedur meskipun tidak ada hasil kesepakatan tetapi sudah dijalankan maka itu sudah berhasil. Jika ditinjau dari segi hasil maka ketika mediasi berhasil maka mediasi dikatakan efektif namun jika ditinjau dari segi prosedur maka apabila mediasi itu sudah dijalankan maka mediasi pun dianggap sudah efektif. Intinya setiap perkara perdata yang diajukan di pengadilan negeri Sungguminasa pada sidang pertama harus diupayakan perdamaian.¹⁰

¹⁰Amiruddin Mahmud (34 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Mei 2017.

Kalau terjadi mediasi sangat besar manfaatnya, karena apabila tidak terjadi mediasi maka perkara akan berlanjut. Kalau perkara berlanjut, ibarat pertandingan pasti ada yang menang ada yang kalah. Jadi tidak akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu kalau mediasi gagal dan yang pasti akan membuang waktu karena 99% proses perkara contohnya, tanah itu tidak akan selesai hanya sampai pada tingkat pertama pasti akan ada upaya hukum banding, kasasi dan itu akan memakan waktu, memakan biaya.

Kalau mediasi itu berhasil akan dituangkan dalam akta perdamaian yang kemudian dituangkan dalam akta putusan perdamaian yang sifatnya sudah menjadi putusan akhir dan itu langsung bisa dinikmati saat itu juga dan tidak ada upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya serta tidak dapat digugat terhadap putusan mediasi. Jadi itulah keuntungan bisa dinikmati tanpa harus menunggu bertahun-tahun.

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah, mengingat bahwa proses berperkara di pengadilan itu lambat dan lama. Kemudian untuk mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan maka beberapa manfaat mediasi sangat besar antara lain proses penyelesaian sengketa melalui mediasi cepat pelaksanaannya, kesepakatan dibuat bersama, sedangkan dari segi emosional penyelesaian dengan pendekatan win-win solution akan memberikan kenyamanan bagi para pihak,

hubungan bisa baik kembali karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.

Tabel 1. Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2013

No	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Tanah	27	2	25
2	Perlawanan	15	1	14
3	Perceraian	6	0	6
4	Wanprestasi	5	0	5
5	Perbuatan Melawan Hukum	5	0	5
6	Ganti Rugi	4	0	4
7	Harta Bersama	1	1	0
8	Utang Piutang	1	0	1
Jumlah		64	4	60

Sumber Data: Pengadilan Negeri Sungguminasa

Dari tabel diatas, perkara yang masuk ditahun 2013 sebanyak 64 perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 4 perkara dan tidak berhasil sebanyak 60 perkara. Menurut hemat penulis dari tingkat keberhasilan pengadilan negeri Sungguminasa ditahun 2013 dalam pelaksanaan mediasi masih kurang atau masih jauh dari harapan, dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Menurut Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa kendala atau hambatan yang paling besar dihadapi

oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga pelaksanaan mediasi tidak efektif yaitu karena keengganan para pihak untuk berdamai pada saat proses mediasi.

Tabel 2. Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2014

No	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Tanah	22	0	22
2	Perbuatan Melawan Hukum	18	0	0
3	Perceraian	7	1	6
4	Wanprestasi	6	1	5
6	Perlawanan	4	0	4
7	Harta Bersama	2	1	1
8	Utang Piutang	1	1	0
Jumlah		60	4	56

Sumber Data: Pengadilan Negeri Sungguminasa

Dari tabel di atas, perkara yang masuk ditahun 2014 sebanyak 60 perkara, yang berhasil dimediasi sebanyak 4 perkara tidak berhasil dimediasi 56 perkara. Tingkat keberhasilan masih sama dari tahun sebelumnya sebanyak 4 perkara. Menurut penulis masih kurang atau belum efektif karena jumlah perkara yang tidak berhasil dengan yang berhasil dimediasi masih sangat jauh berbeda. Kendala terbesar yang dihadapi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2014 diantaranya kurangnya partisipasi para pihak untuk hadir pada saat mediasi berlangsung sehingga perundingan tidak berjalan efektif.

Tabel 3. Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun
2015

No	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Perbuatan Melawan Hukum	40	1	39
2	Perceraian	8	0	8
3	Wanprestasi	6	1	5
4	Tanah	3	0	3
Jumlah		57	2	55

Sumber Data: Pengadilan Negeri Sungguminasa

Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015 sebanyak 57 perkara yang berhasil dimediasi 2 perkara, yang tidak berhasil 55 perkara. Perkara yang masuk pada tahun 2015 menurun dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya. Tingkat keberhasilannyapun menurun, kendala terbesar yang terjadi setiap tahunnya adalah kurangnya itikad baik para pihak untuk hadir pada saat mediasi dan keengganan untuk berdamai.

Tabel 4. Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun
2016

No	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Perbuatan Melawan Hukum	41	1	40
2	Wanprestasi	8	0	8
3	Perceraian	6	0	6
4	Tanah	3	0	3
5	Ganti Rugi	3	0	3
6	Utang Piutang	1	0	1
7	Harta Bersama	1	0	1
8	Perlawanan	1	0	1
9	Warisan	1	0	1
Jumlah		66	1	65

Sumber Data: Pengadilan Negeri Sungguminasa

Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 66 perkara yang berhasil dimediasi 1 perkara, yang gagal 65 perkara. Perkara yang masuk pada tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya sementara tingkat keberhasilannya menurun, hal ini dikarenakan ada beberapa perkara yang tidak dimediasi karena salah satu pihak tidak hadir dan diputus verstek. Kurangnya upaya lebih dari mediator dalam mendorong keinginan para pihak untuk berdamai.

Tabel 5. Data Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2013	64	4	60
2	2014	60	4	56
3	2015	57	2	55
4	2016	66	1	65
Jumlah		247	11	236

Berdasarkan data tersebut diatas mulai dari tahun 2013-2016 secara keseluruhan jumlah perkara terdapat 247 perkara perdata yang jenisnya telah disebutkan dalam tabel 1-3. Dari perkara tersebut ada 11 yang berhasil dimediasi dan 236 lainnya tidak berhasil dimediasi. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Keberadaan mediator bersertifikat ataupun mediator dari kalangan hakim tidak mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi. Jadi tolak ukur efektifnya itu relatif, sebagaimana dikemukakan oleh Amiruddin Mahmud hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa semua hakim telah mendapatkan pelatihan tentang mediasi. Yang bersertifikat ataupun tidak itu hanya berbeda karena ada yang sudah

mendapatkan pelatihan lanjutan dan ada juga yang belum mendapatkan giliran untuk itu.

Pada dasarnya bukan hanya keahlian mediasi yang dibutuhkan tapi harus dilihat dari sengketanya dan kemungkinan untuk didamaikan, dan itu juga tergantung pada para pihak. Jadi bisa saja random atau acak. Bisa saja hakim yang bersertifikat dapat berhasil mediasinya karena perkaranya memungkinkan untuk itu dan bisa saja hakim yang sudah bersertifikat tidak berhasil karena kasusnya juga tidak memungkinkan untuk itu. Intinya, Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berupaya mendamaikan para pihak sebelum perkara tersebut diperiksa. Dan mediator harus selalu berupaya untuk memediasi para pihak yang bersengketa.¹¹



¹¹Amiruddin Mahmud (34 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Sungguminasa, 16 Mei 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke pengadilan negeri Sungguminasa akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak dimediasi maka putusan dianggap batal demi hukum.
2. Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses

perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

3. Efektivitas mediasi di pengadilan Negeri Sungguminasa dari segi hasil masih tidak efektif dikarenakan banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi. Yang menjadi tolak ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan, jika melihat pada hasil maka mediasi berhasil berarti mediasi efektif dan apabila gagal berarti mediasi tidak efektif. Namun dari segi prosedur, apabila mediasi telah dijalankan oleh Pengadilan maka mediasi pun dikatakan efektif. Kemudian persoalan efektif atau tidaknya dikembalikan kepada niat pencari keadilan, apabila para pihak dari awal tidak ingin berdamai jika mediasi gagal maka mediasi dikatakan efektif.

B. Saran

1. Diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
2. Kepada para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Asti, Widya. “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.
- digilib.uinsby.ac.id di akses pada hari kamis tanggal 7 desember 2016
- Emerzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Goopaster, Gery. *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian sengketa MelaluiNegosiasi*; Jakarta : ELIPS Project, 1993.
- Goodpaster, Gery. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Terjemahan Nogar Simanjuntak, Jakarta: Elips, 1999.
- Haris, Hardiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-ilmu sosial*Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Harun, Badriyah. *Prosedur Gugatan Perdata*; Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Ilham, Muhammad. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Analisis Kasus-Kasus di Pengadilan Agama Makassar 2012-2014)”. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994 Lihat juga W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada 1996.
- Maleong, Ixt j. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*; Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Milana, Restami “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.
- Nasution. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. II. Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2011.
- Nurjamal, Daeng dkk. *Terampil Berbahasa*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Pengantar Mediasi, www.images.dalyerni.multiply.com

- Pendekatan Mufakat*; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cet, VI. Jakarta: PT Citra aditya Bakri, 2006.
- Samma, Rahma. “Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupapten Gowa”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sinaga, Budiman N.P.D. *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Edisi 1. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sulaiman, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Diakses pada hari kamis 7 desember 2016.
- Sukadana, I. Made *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan*” Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).
- Sutantio, Retuwulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda Karya, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi : Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*; Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Witanto, D.Y. *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- “Beberapa Permasalahan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan”, *Varia Peradilan*, No. 294 (Mei 2010).
- Yahya, M. Harahap. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

-----, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1991.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurhidayah, lahir di Ritaya pada tanggal 17 Juli Tahun 1995, merupakan anak tunggal dari pasangan Haeruddin dan St. Hasnih. Pertama kali penulis menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Inpres Ritaya Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2001-2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Pallangga tahun 2007-2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya tingkat menengah di SMKN 2 Somba Opu yang pada tahun 2017 berganti nama menjadi SMKN 3 Gowa dengan mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual tahun 2010-2013. Kemudian setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum terhitung mulai tahun 2013-2017. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah swt bisa menimba ilmu yang merupakan bekal di masa depan. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dengan baik dengan membahagiakan orangtua yang selalu mendoakan dan mendukung serta membanggakan kampus UIN Alauddin Makassar dan berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga dan masyarakat.